



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

MINGGU, 20 JANUARI 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Delapan Tahun Tanpa WTP

**Bikin Grup WA WTP,
Pemkot Pasang Target**

BENGKULU - Cukup miris. Sudah delapan tahun terakhir ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tidak pernah meraih predikat wajar tanpa pengec-

ualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Terakhir kali Pemkot menda-

WTP tersebut tahun 2011 lalu di zaman Pemerintahan Walikota H. Ahmad Kanedi, SH, MH.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota (Wawali) Bengkulu, Dedy Wahyudi, SE, MM mengungkapkan,

pihaknya saat ini memang melakukan pembenahan secara keseluruhan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot.

☞ Baca **DELAPAN..** Hal 15

Sambungan dari hal 9

Bahkan bentuk keseriusan pembenahan tersebut, ia mengaku, membuat grup WhatsApp (WA) WTP khusus isinya sejumlah walikota, wawali, sekda dan kepala OPD.

"Bentuk keseriusan kita (kejar WTP, red) itu bahkan kita punya grup WA WTP tersendiri. Dan ini bagian kita untuk selalu mengawasi terkait pembenahan yang sedang dilakukan bersama. Insya Allah hasilnya nanti memuaskan. Ke depan kita bisa meraihnya (WTP, red)," kata Dedy.

Pembenahan dilakukan itu, sambung Dedy, seperti terkait soal temuan yang ada di OPD untuk segera diselesaikan secepatnya tanpa harus menunda-nunda waktu. Bahkan bagian Inspektorat terus mendata dan mengingatkan sejumlah OPD terkait. "Karena jangan sampai dari temuan itu menjadi kendala kita. Makanya kita terus mengingatkan Kepala OPD untuk sama-sama bekerja serius dan tetap bekerja pada ketentuan yang ada. Bila ada temuan sekecil apapun itu segera diselesaikan," ungkapnya.

Terkait soal aset bangunan menurut Dedy, pihaknya juga melakukan

pembenahan total. Seperti aset gedung Balai Adat itu, sebelum untuk dimanfaatkan dengan baik. Maka akan terlebih dahulu harus dilakukan perhaban total. "Karena kondisi gedung itu (Balai Adat) harus dibenahi (renovasi) dulu," tambahnya.

Buat Database Aset

Sementara itu, sejumlah aset milik Pemkot Bengkulu yang belum tertata dengan baik ditenggarai belum memiliki database aset dimasing-masing OPD. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Bengkulu, Heri Ifzan kepada **RB**.

"Dari kunjungan kita ke beberapa daerah. Kita banyak mempelajari bahwa mereka dalam menata aset sudah terkomputerisasi oleh *database* sehingga sudah tertata dengan baik. Sementara di Kota Bengkulu kita belum ada, masih menerapkan sistem manual. Inilah yang menyulitkan dalam pendataan," beber Heri.

Sebagaimana diketahui, menurut Heri, dalam penyelesaian masalah aset membutuhkan waktu panjang. Oleh sebab itu pentingnya adanya *database* tiap OPD tersebut sehingga mempermudah pendataan secara

berkelanjutan. "Dengan sistem komputerisasi, sehingga memudahkan untuk melacak keberadaan aset baik aset tanah ataupun lahan yang ada serta benda bergerak dan tidak bergerak," tuturnya.

Apalagi dikatakan Heri, keberadaan aset bangunan terbengkalai juga belum ada tindaklanjutnya. Padahal waktu membangun aset itu, semua pembangunan yang dilaksanakan itu ada kajian perencanaan. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban dari pengelolanya sendiri untuk bisa berguna bagi masyarakat. "Karena itukan (aset) milik Negara, milik daerah. Maka dari itu aset seperti Balai Adat itu tidak boleh dibiarkan terbengkalai, harus diselamatkan," tegas Heri.

Lanjut Heri, jika negara dirugikan tentunya yang paling dirugikan adalah rakyat atau masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya sampai saat ini masih terus mendalami dan mengkaji terkait dengan permasalahan aset terbengkalai tersebut. "Makanya selama ini pemkot tidak pernah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPKRI, karena penataan sejumlah aset masih kurang berjalan dengan baik," pungkasnya. **(new)**